

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aribowo, *et.al.*, 1996, *Mendemokratiskan Pemilu*, Jakarta: ELSAM
- Azra, Azyumardi, 2000, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Jakarta.
- Budiarjo, Miriam. 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia
- Cornel, R.W., 1987, *Gender & Power*, Stanford, California: Stanford University Press
- Fakih, Mansour. 1998, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar & INSIST
- Friedman, Lawrence M. 2015, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Terjemahan M. Khozin), Bandung: Penerbit Nusa Media
- Ihromi, T.O., (ed), 2000, *Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan*, Bandung: Alumni
- Karam, Azza, *et.al.*, 1999, *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah, Bukan sekedar Hiasan*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan
- Karim, M. Rusli, 1991, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya
- Irianto, Sulistyowati, (ed), 2009, *Hukum yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Ramlan Surbakti dan Hari Fitrianto, 2015, *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*, Jakarta: Kemitraan
- Reynolds, Andrew, *et.al.*, 2016, *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA (Electoral System Design: The New International IDEA Handbook)*, terjemahan Perludem, Jakarta: International IDEA
- Santoso, Topo dan Ida Budhiati. 2019, *Pemilu di Indonesia, Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, Jakarta: Sinar Grafika

- Savitri, Niken, 2008, *HAM Perempuan: Kritik Teori Feminisme terhadap KUHP*, Bandung: Refika Aditama
- Sibuea, Hotma P., 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Penerbit Erlangga.
- Sihite, Irma latifa. 2011, *Penerapan Affirmative Action Sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Indonesia*, Jakarta: Tesis Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed), 2011, *Metode Penulisan Hukum: Konstelasi & Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Surbakti, Ramlan. 2015, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo
- Tambunan, A.S.S., 1986, *Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD*, Bandung: Binacipta
- Wall, Alan, et.al., 2016, *Desain Penyelenggara Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA (Electoral Management Design: The International IDEA Handbook)*, Terjemahan Perludem, Jakarta: Internasional IDEA

B. Jurnal dan Artikel

- Asshiddiqie, Jimly, dalam artikel berjudul “Gagasan Negara Hukum Indonesia”.
- Budiatri, Aisah Putri, 2011, *Perbandingan Peran dan Kinerja Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan dalam Proses Legislasi Undang-Undang yang Responsif Gender*, Jurnal Kajian Volume 16, Nomor 3, September 2011.
- Irianto, Sulistyowati, 2011, *Praktik Penulisan Hukum Perspektif Sosiolegal*, Artikel yang pernah diterbitkan Sulistyowati Irianto & Shidarta (eds), *Metode Penulisan Hukum: Konstelasi & Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sidharta, Arief, 2004, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, dalam Jentera (Jurnal Hukum), *Rule of Law*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention of Elimination All of Forms Discrimination Against Woman*)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, yang telah diubah sebanyak tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (PKPU 7/2018) yang kemudian diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga PKPU 7/2018.

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (PKPU 20/2018) yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU 20/2018.

Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Perbawaslu 19/2017) yang diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Perbawaslu 19/2017.

D. Website dan Sumber Lain

Anggraini, Titi, *Paling Sedikit 30% Perempuan*, dalam artikel yang dimuat di laman <https://rumahpemilu.org/paling-sedikit-30-perempuan-oleh-titi-anggraini/> (diakses pada tanggal 14 Maret 2023)

Puskapol UI, *Meningkatkan (Lagi) Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Penyelenggara Pemilu*, factsheet dan Zumrotun Nazia, *Memperhatikan Keterwakilan Perempuan 30% di KPU dan Bawaslu* yang dirilis www.rumahpemilu.org pada tanggal 4 Februari 2022.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Pentingnya Keterwakilan Perempuan di Bidang Politik*, Siaran Pers Nomor: B-086/Set/Rokum/MP 01/05/208 tanggal 30 Juni 2018

Berita Resmi Statistik No. 7/01/Th. XXIV, 21 Januari 2021

Pettalolo, Dewi Ratna, *Perempuan dalam Politik dan Pemilu*, materi paparan yang disampaikan pada kegiatan Webinar yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Serang dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, *Zoom Meeting*, Kamis, 18 November 2021

